

## **BAB IV**

### **UPAYA INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) MEMBERIKAN PERINGATAN DINI UNTUK MENCEGAH KONFLIK BERKELANJUTAN DAN MEMBANGUN KEMBALI SURIAH**

Dalam Bab 4 ini akan dijelaskan bagaimana peran dan fungsi ICRC sebagai pelopor Hukum Humaniter Internasional, bagaimana perannya dalam konflik di Suriah, apa saja upaya-upaya program yang sudah ICRC berusaha jalankan serta apa kendala yang dihadapi oleh ICRC selama menjalankan misi kemanusiaan selama konflik Suriah berlangsung.

#### **A. Memberikan Peringatan Dini untuk Mencegah Konflik Berkelanjutan dalam konflik Suriah**

Konflik Suriah berawal sejak tahun 2011 dengan terjadinya pemberontakan dari rakyat Suriah kepada pemerintahnya untuk meminta Presiden Bashar Al-Assad agar mundur dari kekuasaannya. Pemberontakan ini merupakan bentuk luapan kekecewaan dari Rakyat Suriah kepada Rezim Al-Assad yang cukup lama memimpin Suriah serta keinginan untuk mengakhiri lima dekade pemerintahan Partai Ba'ath (Kinsal, 2014). Aksi demonstrasi besar-besaran Rakyat Suriah ini juga dipicu kondisi ekonomi Suriah yang semakin menurun, kebijakan politik yang buruk disertai pula dengan arus *Arab Spring* yang tengah melanda beberapa negara di Timur Tengah. Rakyat menginginkan reformasi namun Bashar

Al-Assad selaku presiden menanggapi dengan kekerasan. Konflik kian memuncak menjadi pemberontakan nasional ketika ditangkapnya lima belas pelajar yang membuat tulisan provokatif berisi kebencian kepada rezim Bashar Al-Assad. Pelajar-pelajar itu ditangkap dan mengalami penyiksaan oleh pihak keamanan Suriah. Semenjak kasus ini memuncak, demonstrasi di Suriah semakin meluas hingga ke beberapa kota di Suriah diantaranya Deraa, Latakia, Homs, Hama dan beberapa kota lainnya. Demonstrasi ini bahkan sampai melibatkan militer Suriah untuk meredakan rakyat-rakyat yang melakukan demonstrasi. Sampai pada tahun 2015, *Syrian Center for Policy Research* menyatakan bahwa jumlah korban tercatat sudah mencapai 470 ribu nyawa (Sylaby, 2016). Jumlah ini merupakan dua kali lipat dari perkiraan PBB yang menyatakan korban akan berkisar 200 ribu jiwa.

Jumlah korban bertambah setiap harinya serta tindakan Presiden Bashar Al-Assad yang semakin tidak terkontrol menjadikan Suriah sebagai sorotan utama dunia internasional. Banyak negara-negara yang mengecam tindakan kekerasan Bashar Al-Assad tersebut. Selain negara, organisasi internasional serta LSM internasional gencar menyuarakan Bashar Al-Assad telah melanggar hukum internasional. PBB sebagai organisasi internasional yang bertanggungjawab menjaga perdamaian internasional menambahkan bahwa dalam konflik ini Rakyat Suriah sangat sulit untuk mendapatkan akses bantuan baik perawatan medis, makanan, obat-obatan, pakaian dan tempat tinggal. Menanggapi hal ini, PBB membuat sebuah resolusi dimana resolusi ini menuntut pihak yang berkonflik khususnya Pemerintah Suriah membiarkan dan memberikan akses bantuan kemanusiaan cepat, aman dan tanpa hambatan dari badan-badan kemanusiaan

PBB dan mitra mereka kepada para korban yang membutuhkan (Kinsal, 2014). Salah satu mitra PBB dan menjadi agen yang sangat dibutuhkan dalam krisis kemanusiaan Suriah adalah *International Comiittee of The Red Cross (ICRC)* atau biasa dikenal dengan sebutan Palang Merah Internasional.

ICRC merupakan lembaga swasta non pemerintah sekaligus sebagai promotor Hukum Humaniter Internasional yang bertugas menolong korban-korban konflik di berbagai dunia. Keberadaan ICRC di Suriah merupakan sebuah mandat yang didukung oleh masyarakat internasional yang menilai Pemerintah Suriah gagal melindungi rakyatnya. Kegiatan ICRC ini didukung pula oleh pernyataan internasional yang menyatakan bahwa Suriah telah melanggar Hukum Humaniter yang tertera di Konvensi Jenewa dan protokolnya. Ketika suatu negara sudah melanggar Hukum Humaniter Internasional maka negara tersebut sudah dianggap tidak memiliki kedaulatan sehingga ICRC sebagai promotor Hukum Humaniter Internasional berhak masuk ke Suriah untuk memberikan bantuan kepada para korban.

Konflik di Suriah yang terjadi awal tahun 2011 tercatat telah membunuh lebih dari 15.000 warga Suriah sementara ratusan lainnya luka-luka dan mengungsi ke perbatasan (Bernad, 2013). Konflik ini terus bergulir dan mengakibatkan akses kebutuhan dasar manusia seperti air, makanan, obat-obatan dan tempat tinggal sangat terbatas. Banyak keluarga yang kehilangan rumah mereka dan berusaha bertahan hidup tanpa listrik, air minum yang tidak memadai, infrastruktur yang rusak dan minimnya layanan kesehatan masyarakat. Bahkan sistem pelayanan kesehatan yang tersisa terpaksa dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak menjadi sasaran serangan pihak-pihak berkonflik (ICRC,

Krisis di Suriah Memasuki Musim Dingin Ketiga, 2013). Persediaan perlengkapan kesehatan, makanan dan kebutuhan lainnya semakin menipis terutama di daerah yang dikepung dan situasinya semakin kritis. Keterbatasan ini menjadi salah satu penyebab semakin tingginya jumlah korban sipil maupun kombatan. Tingginya angka korban kemanusiaan di Suriah menjadi sorotan utama dunia internasional. Suriah berada dalam krisis kemanusiaan besar-besaran dan telah melanggar aturan kemanusiaan. Bahkan salah satu LSM HAM Internasional yaitu *Human Right Watch* atau HRW menegaskan kekerasan di Suriah telah menewaskan banyak korban dengan pemerintah Suriah yang sengaja menggunakan angkatan militernya untuk menembaki warga sipil tersebut. Angkatan militer itu juga memutus komunikasi dan melakukan penjagaan untuk membatasi pergerakan para demonstran sekaligus membatasi bantuan kemanusiaan seperti makanan, air dan obat-obatan kepada para korban (Fitria, 2012). Kepala Operasi ICRC untuk Timur Tengah, Robert Mardini juga mengatakan bahwa warga sipil yang terperangkap di daerah-daerah dimana bantuan kemanusiaan tidak diizinkan masuk merupakan kategori yang paling rentan apalagi saat Suriah memasuki musim dingin (ICRC, Krisis di Suriah Memasuki Musim Dingin Ketiga, 2013). Pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan Suriah ini mendapatkan kecaman dari berbagai pihak bahkan Perancis dan Inggris menyatakan akan mengirimkan militer mereka ke Suriah setelah diketahui bahwa Suriah menggunakan bahan kimia sebagai senjata. Kecaman-kecaman internasional semakin banyak memojokkan Suriah, namun tidak ada yang berhasil menghentikan konflik yang terus bergulir ini. Bahkan PBB yang bertanggungjawab mengawasi perdamaian internasional menemui jalan buntu.

Usaha untuk melindungi keamanan manusia dalam situasi berkonflik membutuhkan beberapa tahapan penyelesaian. Untuk mewujudkan keamanan terhadap kemanusiaan, maka keamanan disuatu negara harus diwujudkan terlebih dahulu. Barry Buzan mengatakan bahwa membicarakan keamanan internasional tidak lagi hanya membicarakan tentang keamanan negara, namun berkaitan juga dengan keamanan manusia (Padilah, 2016). Keberadaan negaralah yang akan berperan mengkategorikan mana agen, lembaga atau individu. Ditengah krisis yang terus melanda Suriah, ICRC sebagai pelopor Hukum Humaniter terlibat langsung dalam konflik ini. Suriah jelas telah melanggar Hukum Humaniter Internasional sehingga menyebabkan tewasnya ribuan nyawa warga sipil. Suriah dinilai gagal memberikan perlindungan dan rasa aman kepada rakyatnya sehingga ICRC dengan mandat internasional akan menggantikan peran tersebut.

Mengemban tanggungjawab dari masyarakat internasional, ada fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan ICRC dalam setiap agenda kegiatan. Fungsi pertama adalah sebagai monitoring atau fungsi pengamatan dilakukan ICRC untuk menilai kondisi konflik yang sedang terjadi di Suriah. Dalam konflik Suriah ini apakah masih ada prinsip Hukum Humaniter yang masih dijalankan atau tidak. Pada saat konflik masih bersifat internal, lembaga-lembaga internasional bersikap sebagai pengamat jalannya konflik. Ketika konflik semakin parah, maka organisasi internasional seperti PBB dan Liga Arab mulai turun tangan termasuk juga ICRC. ICRC melakukan pengamatan terhadap konflik di Suriah sesuai asas-asas Hukum Humaniter Internasional. Delegasi Bulan Sabit Merah Arab yang beroperasi di Suriah mengumpulkan data dan laporan terkait keberlangsungan konflik. Ketika konflik Suriah kian memburuk maka ICRC mengadakan

pertemuan dengan lembaga internasional salah satunya dengan PBB, negara-negara dan beberapa ahli untuk membicarakan konflik Suriah. Diskusi ini akan mengumpulkan data-data penting laporan dari berbagai pihak yang kemudian akan diputuskan apakah Suriah telah melakukan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional. Peter Maurer sebagai Presiden Komite Palang Merah Internasional mengatakan bahwa skala krisis kemanusiaan di Suriah mencapai taraf sangat memprihatinkan. Bahkan, Ia sampai melakukan kunjungan selama tiga hari untuk melihat keadaan Suriah secara langsung sekaligus mengadakan pertemuan resmi kepada Pemerintah Suriah. Peter menekankan agar akses kemanusiaan oleh ICRC diberikan izin bebas kepada para korban. Peter mengatakan ICRC menghadapi kendala memberikan bantuan kepada para korban, bahkan akses untuk masuk ke daerah berkonflik ditutup rapat. Selain itu, Peter juga sempat mengunjungi pengurus dan relawan Bulan Sabit Merah serta keluarga-keluarga yang mengungsi dari konflik di Kota Damaskus. Ia juga mengunjungi tempat-tempat penahanan dan memastikan para tawanan diperlakukan manusiawi dan terjangkau oleh pelayanan kesehatan yang memadai (ICRC, Presiden ICRC Prihatin Tentang Nasib Warga Sipil di Suriah, 2014).

Setelah ICRC berhasil masuk ke Suriah, ICRC melaksanakan Fungsi promosi, pelindung serta pengawasan dimana fungsi-fungsi ini dilaksanakan untuk mempertahankan dan melindungi Hukum Humaniter Internasional. ICRC harus memastikan bahwa Hukum Humaniter akan berjalan sesuai ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang tertuang di Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan. Selain itu, melakukan upaya advokasi kepada pemerintah Suriah dan masyarakat Suriah agar memperhatikan nilai-nilai Hukum Humaniter.

Oleh karena itu, ICRC menanamkan Hukum Humaniter Internasional dalam berbagai aspek kegiatan untuk mencegah dan membatasi kemungkinan terburuk konflik. Pencegahan dalam hal komunikasi yaitu ICRC berusaha mendorong Pemerintah Suriah untuk menerapkan kebijakan nasional yang mendukung hukum dan advokasi tentang hak asasi manusia khususnya terhadap anak-anak dan perempuan serta bagaimana melindungi keamanan kemanusiaan. Tindakan yang dilakukan ICRC ini merupakan *early warning* sebelum dilakukannya tindakan nyata dalam konflik Suriah. Tindakan ini dilakukan ICRC saat awal konflik terjadi, ketika status konflik suatu negara adalah konflik internal yang belum bisa melibatkan intervensi negara lain bahkan PBB. *Early Warning* merupakan upaya pencegahan dengan memberikan peringatan kepada pihak berkonflik khususnya kepada negara yang dilakukan atas kriteria jenis konflik menurut komunitas internasional. Peringatan ini bersifat rahasia dimana ICRC secara diam-diam bertemu dengan Pemerintah Suriah dan meminta penghentian tindakan kekerasan pada warga sipil. Ketika peringatan ini diabaikan maka ICRC akan mempublikasikan pernyataan bahwa Suriah telah melanggar Hukum Humaniter Internasional sehingga masyarakat internasional bisa ikut terlibat memberikan respon, baik secara lisan maupun tindakan dalam konflik di Suriah ini. Pernyataan dari ICRC sebagai pelopor Hukum Humaniter Internasional ini menjadi aspek yang penting untuk menentukan bagaimana sikap dan respon masyarakat internasional ke depannya. Walaupun ICRC tidak memiliki wewenang memberikan hukuman kepada pihak-pihak yang melanggar Hukum Humaniter Internasional, namun tindakan ICRC dijadikan patokan masyarakat internasional merespon sebuah konflik seperti halnya konflik di Suriah (ICISS, 2001).

Upaya pemberian peringatan ini diantaranya ialah ICRC melakukan advokasi kepada Pemerintah Suriah agar memperbaiki sektor sosial dan menjamin hak anak-anak terlebih kepada anak-anak yatim piatu agar mereka bisa mendapatkan pendidikan, pelayanan sosial dan kesehatan secara layak. Perlindungan kepada kaum perempuan ditunjukkan agar mereka mendapatkan rasa aman, tidak mengalami kekerasan fisik maupun mental dan segala bentuk pelecehan seksual. Pengembangan pendidikan diberikan juga kepada para perempuan sebagai pengembangan diri dalam emansipasi wanita. Selain itu, ICRC memberikan pengetahuan serta pemahaman mendalam tentang hak asasi manusia dan bentuk perlindungannya. Kesempatan ini dimanfaatkan ICRC untuk mempromosikan dan mengintegrasikan Hukum Humaniter Internasional dalam kurikulum resmi dalam kegiatan pengajaran, pelatihan, hukum dan sektor lainnya. Hal ini bertujuan agar warga Suriah mudah mengetahui seberapa penting perlindungan hak asasi manusia dan mereka dapat memanfaatkannya sebaik mungkin tanpa mengandalkan alat militer serta memberikan respon cepat pada daerah yang membutuhkan bantuan. ICRC banyak terfokus dan memprioritaskan sektor pendidikan, bahkan mengembangkan pendidikan yang berprofesi hukum, politik dan jurnalistik karena dalam bidang-bidang ini memiliki keterkaitan pada implementasi Hukum Humaniter Internasional. ICRC mengadakan agenda kegiatan bersifat preventif yang bertujuan untuk meminimalisir dampak konflik serta efek-efek buruk yang bisa saja timbul. Kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif ini akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku untuk melindungi korban-korban yaitu warga sipil ataupun tentara-tentara yang terluka pada saat konflik berlangsung. Sehingga akan ada upaya melakukan peningkatan keamanan

serta memberikan fasilitas akses medis serta bantuan kemanusiaan lain. Sasaran-sasaran utamanya adalah angkatan bersenjata, pihak keamanan dalam kepolisian, pasukan khusus, para tokoh masyarakat, pengambil keputusan, para remaja dan akademisi. Aktor-aktor ini dinilai lebih mudah memahami Hukum Humaniter Internasional.

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin militernya memahami Hukum Humaniter Internasional dan prinsip kemanusiaan universal. ICRC berupaya agar proses ini diterima oleh aparat keamanan setempat sehingga mereka bisa melaksanakan tugas berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang benar. Bahkan tersedia pula pelatihan bagi para anggota militer untuk mengetahui pola kerja ICRC dan Himpunan Palang Merah Internasional dalam proses menyelamatkan korban konflik agar lebih efisien dan menjamin keamanan para pekerja kemanusiaan. Bila pelanggaran terhadap hak asasi manusia terjadi, maka mereka dapat melaporkannya melalui jalur hukum tingkat nasional atau internasional. ICRC juga melakukan kerjasama dengan pemerintah untuk memperkuat pantauan kepada program anak-anak serta pengembangan undang-undang sebagai salah satu kebijakan dan strategi pendukung hak asasi manusia. Untuk mewujudkan upaya-upaya pencegahan tersebut, ICRC berusaha untuk selalu dekat dengan para korban agar mudah untuk mengingatkan pemerintah atas tanggungjawabnya melindungi warga sipil, tawanan dan prajurit yang terluka sesuai aturan kemanusiaan. Selain itu, ICRC berhak memberikan rekomendasi kepada pemerintah Suriah untuk membuat sebuah tindakan pencegahan demi memperbaiki keadaan penduduk yang terkena dampak konflik. Mereka yang seharusnya mendapatkan perlindungan yang utama adalah penduduk sipil yang

notabennnya tidak terlibat dalam konflik sehingga tidak boleh diserang. Mereka harus diselamatkan dan dilindungi (ICRC, Kenali ICRC, 2005). Yang kedua adalah tahanan perang, dimana ICRC berkewajiban dan diberikan hak untuk mengunjungi para tahanan untuk mencegah kasus orang hilang serta kemungkinan adanya perlakuan yang tidak baik kepada para tahanan tersebut. Membantu memulihkan kontak antara tahanan dan keluarganya serta memperbaiki kondisi tahanan sesuai batasan wajar yang berlaku untuk meminimalisir ketidaklayakan kondisi yang diterima.

Untuk memaksimalkan misi kemanusiaannya, ICRC juga melakukan diplomasi kemanusiaan dengan membuat kerjasama dengan berbagai pihak yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Seperti halnya LSM-LSM pembela HAM dan organisasi internasional yang fokus pada permasalahan HAM, sehingga ICRC mampu melakukan koordinasi dan kerjasama kerja dengan pihak tersebut demi memaksimalkan bantuan kemanusiaan. Hal ini dilakukan agar pihak-pihak tersebut mengetahui agenda kerja ICRC di Suriah sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan kemanusiaan oleh beberapa pihak. Dengan adanya laporan ini maka pihak-pihak lain dapat melakukan agenda kegiatan mereka dalam sektor lain atau melakukan kerjasama dengan ICRC dalam beberapa agenda. Pengawasan kepada konflik Suriah juga dapat dilaksanakan bersama dalam kerjasama kemanusiaan ini sehingga banyak pihak yang akan memberikan peringatan kepada Pemerintah Suriah dan Oposisi.

## **B. Membangun Kembali Suriah**

Konflik Suriah yang selama lima tahun telah merenggut 400 ribu jiwa, hal ini berdasarkan laporan terbaru dari *Syrian Center for Policy* pada tahun 2016.

Angka ini dua kali lipat dari yang diperkirakan PBB sebelumnya (Sylaby, 2016). Berbagai pelanggaran hak asasi manusia telah dilakukan Suriah selama konflik berlangsung. Mulai dari pelanggaran terhadap warga sipil berupa penculikan, penahanan dan penyiksaan fisik. Pelanggaran nilai-nilai kemanusiaan itu terjadi di kota-kota besar di Suriah seperti Homs, Deraa, Damaskus, dan Hama. Dan atas banyaknya pelanggaran yang terjadi, PBB menyatakan bahwa Tentara Suriah bertanggungjawab besar di dalam konflik ini. Konflik ini menimbulkan dampak besar terhadap keadaan Suriah. Diantaranya, banyak pelanggaran kemanusiaan yang telah terjadi mengakibatkan gelombang pengungsi. Para pengungsi ini kehilangan tempat tinggal mereka dan merasa tidak aman menetap di Suriah sehingga memilih melarikan diri ke negara tetangga. Gelombang-gelombang pengungsi timbul akibat kota-kota di Suriah yang menjadi tempat tinggal mereka hancur akibat gempuran senjata antara pemerintah Suriah dan pihak oposisi. Suriah yang dikenal sebagai negara yang memiliki kota-kota bersejarah yang menjadi daya tarik para wisatawan mancanegara kini hanya tersisa puing-puing reruntuhan bangunan tak berguna. Kota bersejarah terbesar yaitu Aleppo mengalami kehancuran fatal, bahkan kompleks Masjid Umayyah yang sangat terkenal juga hancur termasuk kota kuno yang berada di Bosra Selatan. Beberapa bangunan lain yang merupakan warisan dunia UNESCO hanya menjadi bangunan-bangunan tua yang diabaikan. Kota-kota konflik di Suriah mayoritas mengalami kerusakan total dan ditinggalkan begitu saja. Fasilitas publik tidak berfungsi, bangunan sekolah rusak, gedung rumah sakit mengalami kerusakan yang mengakibatkan sulitnya pemberian layanan kesehatan kepada para korban.

Dengan situasi Suriah yang kian memburuk karena kehancuran kota dan kerusakan fasilitasnya, ICRC menjalankan fungsinya melakukan tindakan nyata dengan memberikan bantuan kepada para korban. ICRC mengkoordinasi, memberikan bantuan finansial kepada warga sipil, menjamin hak-hak mereka agar terpenuhi serta memastikan mereka mendapatkan perawatan dan penanganan medis yang layak. Sebanyak 70 truk pembawa bantuan kemanusiaan telah dikirimkan untuk pertama kalinya di kota-kota terkepung di Suriah. Bantuan diberikan di wilayah dekat Damaskus yaitu Madaya dan Zabdani serta Desa Al-Foua dan Kefraya di barat laut Suriah. Menurut data PBB, di Madaya terdapat 40 ribu masyarakat sipil yang terkepung oleh tentara Pemerintah Suriah selama kurang lebih enam bulan. Sementara di Zabadani sebanyak seribu jiwa, Kefraya dan Al-Foua sebanyak dua puluh ribu jiwa. Kota-kota ini mulai dikepung tentara Pemerintah Suriah sejak April 2015 (Ratna, 2016)

Para korban pengungsi yang masih berada di dalam negeri tinggal di kamp-kamp perlindungan ICRC dan mendapatkan perawatan serta kebutuhan air serta makanan. Sedangkan para pengungsi yang berada di perbatasan atau yang sudah berada di negara lain disekitar Suriah, ICRC mengusahakan dokumen perjalanan yang legal kepada mereka agar dapat diterima secara administrasi di negara yang dituju dan mereka bisa kembali ke Suriah ketika konflik mulai mereda. Arus pengungsi yang tak sedikit menyebabkan mereka kehilangan keluarga mereka. Dalam membantu masalah ini, ICRC membentuk *Central Tracing Agency* atau Biro Pusat Pencarian yang bertugas mengumpulkan data, memproses dan meneruskan informasi tentang orang-orang hilang. Salah satu program dari biro ini adalah *Red Cross Messages* yaitu sebuah program dimana

para korban atau tawanan perang dapat menyampaikan pesan-pesan mereka kepada sanak saudaranya yang terpisah maupun sebaliknya. Hal ini disesuaikan dengan hak asasi manusia setiap individu untuk tetap saling berkomunikasi satu sama lain. Program ini nyatanya berhasil mempertemukan orang-orang hilang kepada keluarganya. Di Damaskus misalnya, Delegasi ICRC telah menerima sebanyak 201 permintaan dari orang-orang yang melaporkan kehilangan keluarga mereka. Kemudian ICRC mendistribusikan Pesan Palang Merah (*Red Cross Message*) yaitu satu Pesan Palang Merah berisi berita keluarga dan 14 pesan lisan kepada anggota keluarga terutama bagi yang berada di luar Suriah dan juga menyelenggarakan pertemuan 25 Departemen Kesehatan dari Seluruh Suriah (ICRC, Syria: Aid delivery across front lines in Homs, 2014).

Program ICRC mempertemukan keluarga-keluarga yang hilang merupakan salah satu upaya ICRC menyelamatkan warga asli Suriah untuk tetap hidup dan selamat. Karena bagaimanapun juga, Suriah merupakan rumah bagi mereka dimana mereka dilahirkan dan menjalankan kehidupan mereka selama ini. Walaupun konflik Suriah mengakibatkan banyak pertumpahan darah, namun masih ada warga sipil yang ingin tetap tinggal dan mengharapkan Pemerintahan Suriah peduli kepada hak hidup mereka kedepannya. ICRC selain membantu dalam memberikan perawatan dan bantuan kebutuhan korban, Ia juga berusaha agar bisa membangun kembali Suriah menjadi negara yang utuh sedia kala. Terlepas dari pemerintah Suriah yang setuju atau tidak akan kehadiran ICRC di dalamnya. ICRC mencari cara agar warga Suriah dapat terjamin kesehatannya, meringankan beban kesulitannya serta memastikan tidak ada yang membahayakan masa depan mereka (ICRC, Kenali ICRC, 2005).

Hal ini mengingat ICRC membawa mandat internasional dan ditugaskan untuk menggantikan peran Suriah yang gagal melindungi rakyatnya. ICRC membuat program-program pembangunan diantaranya adalah program air dan habitat. Program ini adalah program yang sangat pokok karena kebutuhan air dan habitat merupakan kebutuhan vital manusia. ICRC berusaha menyediakan air bagi para korban dan melindungi mereka dari bahaya lingkungan akibat konflik. Demi menyediakan akses air bersih, ada beberapa proses yang harus dilakukan oleh ICRC, yaitu : (ICRC, Kenali ICRC, 2005)

- a. Memperbaiki Instalasi air, memperbaiki jaringan distribusi air serta membuat sistem air gravitasi yang kemudian akan disalurkan ke pompa-pompa kecil rumah tangga
- b. Memanfaatkan sumber air dengan membuat sumur dan membuat sistem pengaliran air ke tempat penampungan air
- c. Menemukan sumber air, mensterilkan air kotor menjadi air yang boleh untuk diminum kemudian mendistribusikannya
- d. Memperbaiki dan membuat toilet umum, membuat sistem pengolahan limbah yang higienis khususnya untuk limbah-limbah medis
- e. Membangun kembali dan merenovasi bangunan-bangunan kesehatan dan sekolah-sekolah
- f. Mengusahakan perbaikan prasarana di tempat-tempat penahanan para tawanan agar mereka mendapatkan kebutuhan air yang layak dan sanitasi yang baik

- g. Membuat kamp-kamp pengungsi dengan standart kelayakan yang baik
- h. Memberikan pengetahuan tentang perlindungan makanan, hewan-hewan pembawa penyakit dan pengalihan penggunaan energi alternatif

ICRC melakukan kerjasama dengan Bulan Sabit Merah Arab untuk mengoptimalkan kinerja distribusi bantuan kepada para korban. Mereka mengupgrade fasilitas air di beberapa kota berupa tempat penampungan air seperti di Pedesaan Damaskus untuk 400 pengungsi, di Aleppo untuk 200 pengungsi dan dua tempat penampungan di Kota Homs untuk 265 pengungsi (ICRC, Syria: Aid delivery across front lines in Homs, 2014). Insinyur ICRC melaporkan bahwa mereka bersama Bulan Sabit Merah Arab memberikan pasokan air bersih ke daerah-daerah konflik di Homs. Pasokan air bersih ini diberikan kepada lebih dari 70.000 korban yang terkepung di Kota Homs (ICRC, Syria: Aid delivery across front lines in Homs, 2014). Kemudian mereka juga menyediakan pasokan pemurnian air agar bisa digunakan pada pabrik-pabrik pengolahan air di Deir Ezzor, Raqqa, Al-Hassakeh, Aleppo dan Al Sweida. Dengan penggunaan bahan pemurnian air yang aman ini setidaknya bisa memenuhi sementara kebutuhan air para korban selama proses pembuatan sumber air yang sedang dikerjakan. Bantuan-bantuan ini diantar oleh truk-truk yang ditujukan kepada lebih dari 100.000 pengungsi di beberapa kota. ICRC melakukan pengujian air serta analisis pompa Al Mazraa di Damaskus, menyediakan peralatan untuk melindungi pompa di stasiun utama di Aleppo yaitu stasiun Suleiman Al-Halabi, melakukan pemeliharaan generator di Pedesaan Homs, memperbaiki jaringan air di Pedesaan

Aleppo serta melakukan distribusi 200.000 botol air kepada para pengungsi dari Kota Deraa.

Operasi di Suriah merupakan operasi terbesar sepanjang sejarah agenda kemanusiaan ICRC. Akses kesehatan khususnya menjadi kebutuhan vital melihat situasi Suriah yang porak-poranda akibat gempuran senjata dan mengakibatkan bangunan-bangunan hancur termasuk bangunan rumah sakit. Program-program kesehatan dilaksanakan ICRC demi efisiensi pemberian bantuan kesehatan dan melakukan pencegahan keterlambatan penanganan medis bagi korban-korban. Upaya bantuan kesehatan ICRC ini ditangani oleh dokter-dokter ahli dengan alat-alat medis standart internasional sehingga mereka dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik. Untuk mendukung efektivitas pelayanan medis, maka ICRC membangun kamp-kamp kesehatan darurat sementara selama proses pembangunan dan rehabilitasi bangunan rumah sakit yang hancur. Kemudian membuat manajemen rumah sakit yang baik, memberikan pelatihan kepada paramedis lokal, melakukan pengawasan kesehatan berkala kepada penduduk setempat, penyediaan obat-obatan dan alat medis serta pengadaan tim-tim dokter bedah ahli dari berbagai negara (ICRC, Kenali ICRC, 2005). Bahkan sebanyak 350 staf telah dikerahkan di berbagai wilayah Suriah untuk membantu menyediakan makanan, air, obat-obatan serta kebutuhan penting lainnya (ICRC, ICRC Menyerukan Penghentian Pengepungan dengan Segera dan Serentak Di Seluruh Suriah, 2016). Adapula bantuan darurat berupa makanan yang diberikan kepada 500.000 orang pengungsi di kota-kota yang hancur seperti di Damaskus, Homs, Hama dan Idlib. Lalu diadakan pula pembuatan dapur umum untuk pengungsi sebanyak 17.000 orang yang tinggal ditempat penampungan sementara

di wilayah Pedesaan Damaskus, Homs dan Lattakia. Selain bantuan makanan dan tempat tinggal, diberikan pula kepada 150.000 pengungsi berupa alat-alat kebersihan, selimut, kasur, handuk, alat memasak dan kebutuhan lainnya. ICRC dalam kerjasamanya dengan Bulan Sabit Merah menyediakan dan memberikan dukungan finansial kepada Sembilan klinik di Suriah serta fasilitas rawat jalan bagi Pedesaan di Damaskus, Aleppo, Idlib, Hama, Homs dan berbagai kota lainnya. Rata-rata kapasitas pelayanan mereka dapat melayani 7000 pasien selama sebulan. Kemudian ICRC dan Bulan Sabit Merah Arab juga membuat pelatihan pertolongan pertama kepada hampir 90 relawan Bulan Sabit Merah Suriah, memberikan persediaan yang cukup untuk keperluan Rumah Sakit, membuat generator listrik fasilitas medis di kamp-kamp dan rumah sakit di Aleppo.

Selain bekerjasama dengan Bulan Sabit Merah Arab, ICRC bersama dengan UNICEF, *Save The Children*, ICRC memberikan pertolongan kepada anak-anak korban konflik Suriah dengan membentuk sebuah program rehabilitasi untuk anak-anak yang terlibat perang. Hal ini dilakukan sebagai sebuah terapi mental bagi anak-anak Suriah khususnya mereka yang tergabung sebagai tentara anak. ICRC mendukung penuh pusat-pusat perawatan bagi anak-anak yang sedang dalam proses pencarian keluarga. Kemudian dibangunlah sekolah-sekolah untuk anak-anak agar mereka tetap mendapatkan pendidikan layak walaupun dalam kondisi negara yang sedang berkonflik. Untuk menunjang pengadaan pendidikan tersebut, ICRC telah memberikan persediaan perlengkapan sekolah kepada hampir 4.000 anak-anak terlantar di Damaskus (ICRC, Syria: Aid delivery across front lines in Homs, 2014).

Selain perbaikan pembangunan air, fasilitas kesehatan dan pendidikan, ICRC juga memberikan bantuan pada sektor keamanan ekonomi. Keamanan ekonomi yang dilakukan ICRC ini bertujuan agar para korban bisa bertahan hidup dengan memenuhi kebutuhannya sendiri pasca pemberian bantuan. ICRC memberikan modal bantuan awal bagi para korban yang kemudian akan dilanjutkan oleh para korban di bawah pengawasan dari ICRC. Beberapa bentuk bantuan ekonominya adalah : (ICRC, Kenali ICRC, 2005)

- a. Memberi dukungan ekonomi dengan melindungi produksi utama keahlian yang dimiliki oleh korban sehingga akan mempermudah proses produksi rumah tangga
- b. Memberikan bantuan berupa pemberian barang-barang ekonomi yang bisa menjadi alternative lain ketika faktor produksi gagal. Contohnya adalah kebutuhan pangan seperti beras, roti, pakaian.
- c. Bekerjasama dengan warga setempat memperbaiki sektor ekonomi dan memulihkan swasembada ekonomi bersifat mandiri

### **C. Kendala Yang Dihadapi ICRC Dalam Konflik Suriah**

Keterlibatan ICRC dalam konflik Suriah merupakan mandat internasional setelah Suriah dinyatakan telah melanggar Hukum Humaniter Internasional. Sebagai pelopor Hukum Humaniter Internasional, ICRC berani mengambialih tugas Pemerintah Suriah dalam melindungi warga negaranya. Hal ini dilakukan ICRC sebagai bentuk penghormatan kepada hak-hak manusia. Pemerintah Suriah selama hampir lima tahun sudah menyebabkan kurang lebih 400.000 warga sipil tewas akibat perang militer. Sehingga menuntut ICRC untuk bertindak cepat

melakukan upaya penyelamatan. Pada awalnya ICRC tidak begitu saja ikut campur dalam konflik Suriah yang awalnya berstatus konflik internal negara. Saat konflik mulai berkecamuk, organisasi internasional seperti PBB dan Liga Arab telah memperingatkan Suriah agar mengurangi tindak kekerasan kepada warga sipil. Pada Desember 2011, Suriah menyetujui kunjungan Liga Arab untuk memantau proses implementasi perdamaian di Suriah. Penilaian dari pemantau menunjukkan hasil positif dan mendapat tentangan dari aktivis HAM dan pihak oposisi. Namun ternyata penilaian ini adalah laporan palsu sehingga Liga Arab menarik kembali tim pemantau dan menanggihkan posisi Suriah di Liga Arab. Usaha PBB pun mengalami kegagalan ketika Suriah menolak untuk mematuhi perjanjian dengan PBB sebelumnya agar melakukan gencatan senjata. Gencatan senjata hanya terjadi beberapa hari dan kemudian kembali lagi terjadi konflik bersenjata (Fahham & Kartaatmaja, 2014).

Setelah upaya organisasi internasional gagal, ICRC berusaha melakukan pendekatan dengan Pemerintah Suriah dan melakukan negosiasi untuk pengurangan tindak kekerasan kepada warga sipil. Selain itu, ICRC meminta izin agar pihaknya diperbolehkan untuk memasuki wilayah Suriah dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada para korban konflik. Namun usaha ICRC ini juga gagal, Pemerintah Suriah menolak keterlibatan ICRC karena menganggap konflik ini merupakan konflik internal yang hanya boleh diselesaikan dalam internal Suriah saja. Untuk menghargai kedaulatan negara, ICRC tidak bisa berbuat banyak selain tetap menekan Pemerintah Suriah dari luar. Namun ternyata konflik Suriah semakin besar dan mengakibatkan semakin banyak pelanggaran terjadi dilakukan oleh Pemerintahnya. Dengan mengatasnamakan Hukum Humaniter

Internasional dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya, ICRC melibatkan diri dan masuk ke wilayah Suriah. Mengetahui hal ini, Bashar selaku presiden mengutus tentara untuk memblokade masuknya ICRC ke Suriah dan memberikan peringatan keras pada ICRC untuk keluar dari Suriah. Namun ICRC bersikukuh untuk tetap melibatkan diri dalam konflik dan bertepatan dengan itu pula pola serangan pihak oposisi agresif sehingga tentara Suriah memfokuskan penyerangan kepada para pihak oposisi. ICRC mendatangi kota-kota yang telah banyak mengalami kehancuran seperti Homs, Damaskus, Hama, Idlib untuk mendatangi para korban yang masih bertahan hidup. ICRC memberikan bantuan medis, makanan, tempat tinggal, air dan sanitasi serta pendidikan.

Upaya-upaya misi kemanusiaan ICRC ini sedari awal sudah mendapatkan hambatan yang nyata. Awal keterlibatannya ICRC ke Suriah sudah mendapatkan kecaman dari Pemerintah Suriah bahkan di beberapa kasus, delegasi ICRC ditawan oleh tentara-tentara Suriah. Kegiatan ICRC memberikan bantuan pada para korban dinilai merupakan hal yang sepele oleh pihak-pihak berkonflik sehingga mereka seringkali menghambat program-program ICRC yang sedang dijalankan. Hal ini berkaitan dengan kehadiran awal ICRC yang memang kurang diterima oleh Pemerintah Suriah. Penerimaan kehadiran ICRC dalam suatu konflik dinilai merupakan bentuk intervensi pihak asing kepada Suriah. Padahal, penerimaan ini akan mempengaruhi akses ICRC dalam menjangkau korban-korbannya serta melindungi mereka berdasarkan ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Akses ini yang juga akan menentukan keberhasilan diplomasi ICRC dalam ranah intervensi kemanusiaan yang bersifat melewati batas seperti melakukan kunjungan kepada tawanan perang. Tindakan ini termasuk dalam

urusan pribadi sehingga ICRC seharusnya diizinkan datang menemui tawanan dan berhak berbicara pribadi tanpa ada pengawasan. Namun dalam penerapannya, ICRC hanya dapat menjangkau sebagian kecil dari mereka karena peraturan birokrasi yang rumit dan bahkan tak jarang delegasi ICRC tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari pihak yang menawan misalnya penculikan dan pembunuhan. Dengan melakukan kunjungan kepada para tawanan perang ini maka ICRC bisa menjalankan program *Red Cross Message* kepada para keluarga yang terpisah. Selanjutnya ICRC berusaha melakukan perlindungan kepada setiap individu dengan mengingatkan atau memberikan kecaman agar pihak-pihak yang berkonflik tetap memperhatikan metode perang yang benar dengan jumlah korban yang diminimalisir sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahannya. Dan sekali lagi penerapan ini hanya bersifat tertulis dan dianggap himbauan belaka.

Upaya pendistribusian bantuan juga mengalami kendala seperti dijelaskan oleh Boris Michel selaku Kepala Delegasi ICRC di Suriah. Ia menjelaskan bahwa untuk dapat mengirimkan bantuan-bantuan kemanusiaan ke beberapa kota di Suriah mereka harus melakukan negosiasi berbulan-bulan dengan berbagai pihak. Banyak daerah yang berbulan-bulan tidak bisa menerima bantuan kemanusiaan dan akhirnya berhasil dijangkau. Keberhasilan ini termasuk terobosan besar dalam misi penyelamatan ICRC namun Boris berharap dapat lebih banyak menjangkau daerah lain di waktu selanjutnya (ICRC, ICRC Blog Indonesia, 2014).

Pertempuran di Suriah menyebabkan kerusakan di berbagai sektor dan mengharuskan warga sipil untuk berpindah-pindah menyelamatkan diri. ICRC menyerukan kepada semua pihak agar mereka bisa mematuhi aturan Hukum

Humaniter Internasional dengan memberikan perlindungan kepada warga sipil serta menjamin kesejahteraan rakyatnya, bukan membombardirnya dengan senjata sehingga angka jumlah korban semakin tinggi setiap harinya. ICRC berharap agar Pemerintah Suriah lebih bijak dalam menggunakan militernya mengingat konflik ini barawal dari konflik yang bersifat internal dan dapat diselesaikan dengan cara damai.